

**PERAN PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN
DEMOKRASI (PERLUDEM) DALAM UJI MATERI AMBANG
BATAS PARLEMEN PADA UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh :



Dosen Pembimbing :

1. Dr. Zulfadli, M.SI

2. Andhik Beni Saputra, S.IP, MA

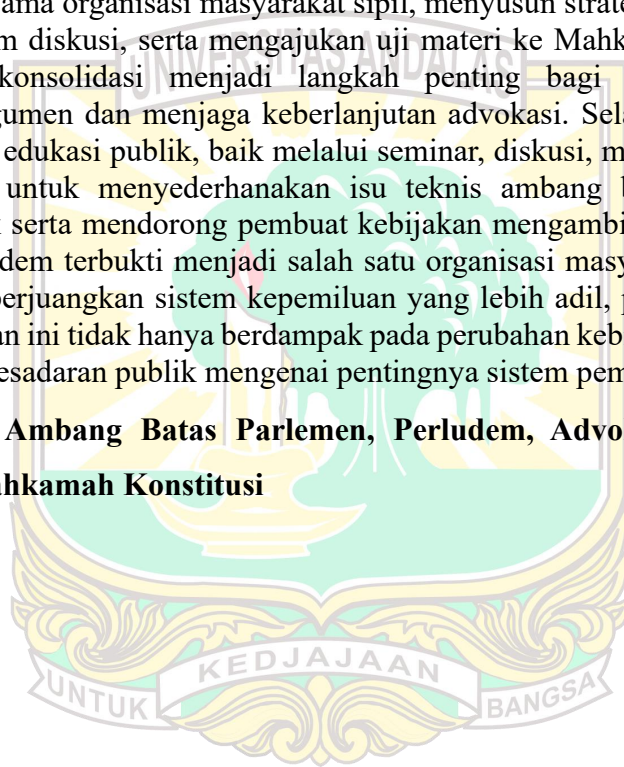
**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam melakukan advokasi kebijakan dalam uji materi ambang batas parlemen pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori *civil society organization* oleh John Keane dan advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ramaditya Rahadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perludem berperan aktif dalam mengadvokasi kebijakan ambang batas parlemen dengan membentuk konsorsium bersama organisasi masyarakat sipil, menyusun strategi melalui kajian ilmiah dan forum diskusi, serta mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Evaluasi dan konsolidasi menjadi langkah penting bagi Perludem untuk memperkuat argumen dan menjaga keberlanjutan advokasi. Selain itu, Perludem juga melakukan edukasi publik, baik melalui seminar, diskusi, maupun pertemuan dengan media, untuk menyederhanakan isu teknis ambang batas agar dapat dipahami publik serta mendorong pembuat kebijakan mengambil keputusan yang lebih adil. Perludem terbukti menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil yang konsisten memperjuangkan sistem kepeiluan yang lebih adil, proporsional, dan demokratis. Peran ini tidak hanya berdampak pada perubahan kebijakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya sistem pemilu yang inklusif.

Kata Kunci : Ambang Batas Parlemen, Perludem, Advokasi Kebijakan, UU Pemilu, Mahkamah Konstitusi



ABSTRACT

This study aims to describe and analyse the role of the Association for Elections and Democracy (Perludem) in advocating for policy in the judicial review of the parliamentary threshold in Law No. 7 of 2017 on General Elections. This study uses a qualitative approach with a case study type, and data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation. The data analysis refers to John Keane's theory of civil society organisations and the policy advocacy proposed by Ramaditya Rahadian. The results of the study show that Perludem played an active role through policy advocacy by forming a consortium with civil society organisations, developing strategies through scientific studies and discussion forums, and submitting a judicial review to the Constitutional Court. Evaluation and consolidation are important steps for Perludem to strengthen its arguments and maintain the sustainability of its advocacy. In addition, Perludem also conducts public education, through seminars, discussions, and meetings with the media, to simplify technical issues related to thresholds so that they can be understood by the public and to encourage policymakers to make fairer decisions. Perludem has proven to be one of the civil society organisations that consistently fights for a more fair, proportional, and democratic electoral system. This role not only impacts policy change but also increases public awareness of the importance of an inclusive electoral system.

Keywords: *Parliamentary Threshold, Perludem, Policy Advocacy, Law on General Elections, Constitutional Court*

